ANALISIS KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DALAM SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat

Disusun Oleh:

SIDIK IMAM SANTOSO
J 410 060 054

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) merupakan instrumen vital dalam sistem kesehatan. Informasi tentang kesakitan, penggunaan pelayanan kesehatan di puskesmas, kematian, dan berbagai informasi kesehatan lainnya berguna untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di tingkat kabupaten atau kota maupun kecamatan.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas mencakup 3 hal: (1) pencatatan, pelaporan, dan pengolahan; (2) analisis; dan (3) pemanfaatan. Pencatatan hasil kegiatan oleh pelaksana dicatat dalam buku-buku register yang berlaku untuk masing-masing program. Data tersebut kemudian direkapitulasikan ke dalam format laporan SP3 yang sudah dibukukan.

Koordinator SP3 di puskesmas menerima laporan-laporan dalam format buku tadi dalam 2 rangkap, yaitu satu untuk arsip dan yang lainnya untuk dikirim ke koordinator SP3 di Dinas Kesehatan Kabupaten. Koordinator SP3 di Dinas Kesehatan Kabupaten meneruskan ke masing-masing pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten, setelah diolah dan dianalisis dikirim ke koordinator SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi dan seterusnya dilanjutkan proses untuk pemanfaatannya.

Frekuensi pelaporan sebagai berikut: (1) bulanan; (2) tribulan; (3) tahunan. Laporan bulanan mencakup data kesakitan, gizi, KIA, imunisasi, KB, dan penggunaan obat-obat. Laporan tribulanan meliputi kegiatan puskesmas

antara lain kunjungan puskesmas, rawat tinggal, kegiatan rujukan puskesmas pelayanan medik kesehatan gigi. Laporan tahunan terdiri dari data dasar yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan lingkungan, peran serta masyarakat dan lingkungan kedinasan, data ketenagaan puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pengambilan keputusan di tingkat kabupaten dan kecamatan memerlukan data yang dilaporkan dalam SP3 yang bernilai, yaitu data atau informasi harus lengkap dan data tersebut harus diterima tepat waktu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, sehingga dapat dianalisis dan diinformasikan.

Laporan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten diduga seringkali terlambat, sehingga data yang diperoleh tidak dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu pelaporan SP3 se-Kabupaten Blora ke DKK Blora sering mengalami hambatan yaitu dalam pelaporannya belum menggunakan teknologi komputer, alat fax belum ada dan untuk pelaporannya petugas yang bertanggungjawab menangani SP3 masih melaporkan sendiri ke DKK. Dari DKK Blora juga menyatakan bahwa pengiriman laporan SP3 dari Puskesmas-puskesmas di Blora banyak tidak tepat waktu. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan evaluasi kegiatan puskesmas di setiap bulannya. Puskesmas yang tepat waktu dalam pelaporan SP3 ke DKK yaitu 6 puskesmas (23,1%) sedangkan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan SP3 ke DKK yaitu 20 puskesmas (76,9%).

Balai Pelatihan Kesehatan (2000:10), menjelaskan bahwa puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah. Puskesmas memiliki wilayah kerja dan berhubungan langsung dengan keluarga di rumah-

rumah mereka. Bila terjadi sesuatu yang kurang menguntungkan dalam masyarakat yang menyangkut masalah kesehatan, maka puskesmas yang menjadi sasaran utamanya. Meskipun puskesmas sebagai dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, namun segala sesuatu di puskesmas sangat terbatas. Terbatas dalam biaya maupun sarananya, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan SP3.

B. Masalah Penelitian

Adakah hubungan antara kualifikasi pendidikan petugas yang bertanggungjawab menangani SP3 dengan ketepatan waktu pelaporan ke DKK, setelah mengontrol pengaruh *confounding factor*, yaitu jumlah petugas dan jarak dari puskesmas ke DKK.

C. Hipotesis

Terdapat hubungan antara kualifikasi pendidikan dan ketepatan waktu, setelah mengendalikan pengaruh *confouding factor* seperti jumlah petugas dan jarak dari puskesmas dari DKK.

D. Tujuan Penelitian

Membuktikan hubungan antara kualifikasi pendidikan petugas yang bertanggungjawab menangani SP3 dengan ketepatan waktu pelaporan ke DKK.

E. Manfaat Penelitian

Informasi yang dihasilkan dari penelitian diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas se-Kabupaten Blora, khususnya dalam ketepatan waktu pelaporan.

F. Ruang lingkup penelitian

1. Ruang lingkup tempat

   Lokasi penelitian ini adalah puskesmas se-Kabupaten Blora, dimana Kabupaten Blora memiliki wilayah kerja 26 puskesmas.

2. Ruang lingkup Waktu

   Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2007.

3. Ruang lingkup materi

   Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada ketepatan waktu dalam pengumpulan SP3 ke DKK, kualifikasi pendidikan petugas, dan jarak puskesmas ke DKK.